



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

UNIT KERJA : RSUD DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EDI MULYANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **432889**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/235 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/54 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 475.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/48 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/65 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
5. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 412.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. LAINNYA, X2FIT SEPEDA STATIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 160 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. MOBIL, HYUNDAI CRETA CRETA TREND Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	358.612.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.085.118.032
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.525.730.032
III. HUTANG	Rp.	146.847.559
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.378.882.473

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.